



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tuntutan reformasi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penerapan sistem pelayanan masyarakat yang prima. Kementerian Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai instansi pemerintah yang memiliki fungsi merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan sumber daya manusia aparatur, pengawasan dan akuntabilitas seluruh instansi pemerintah, berkewajiban untuk meneruskan dan menyukseskan cita-cita reformasi yang saat ini sedang berlangsung. Agar dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan beberapa strategi dan kebijakan baik di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan sumber daya aparatur maupun pemantapan koordinasi sistem pengawasan dan akuntabilitas instansi pemerintah.

Salah satu agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang merupakan kewajiban dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara adalah perbaikan Sistem Manajemen Pemerintahan yang difokuskan pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja pemerintah yang dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dikembangkan media pertanggungjawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara No. 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dana Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Ruang Lingkup

1. Perencanaan strategis, meliputi visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran.
2. Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
3. Akuntabilitas kinerja meliputi pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi pencapaian kinerja
4. Akuntabilitas keuangan.

D. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta



Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Kesbangpol mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan serta fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebagsaan dan Karakter Bangsa: Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri: Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan: Kelompok Jabatan Fungsional;



- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik :
Kelompok Jabatan Fungsional.

E. Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung, maka tersusun isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan DPR, DPD, maupun DPRD serta Kepala Daerah Serentak 2024 akan membawa dampak pada maraknya kegiatan di bidang politik di Kota Bandar Lampung yang rentan akan terjadinya instabilitas politik di daerah.
2. Maraknya kejadian aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat yang dapat menjurus pada aksi-aksi yang anarkis.
3. Masih adanya penolakan pendirian tempat ibadat yang dapat mengarah pada isu-isu intoleransi beragama, maupun sentimen agama yang dapat mengarah pada konflik sosial serta berkembangnya radikalisme di kalangan masyarakat.
4. Masih ditemukan orang asing / Warga Negara Asing yang berkunjung maupun tinggal di kota Bandar Lampung yang dokumen keimigrasiannya tidak sesuai untuk peruntukannya.
5. Berkembangnya berita hoax (berita bohong) yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Dampak yang ditimbulkan adanya berita hoax akan sangat luar biasa antara lain, berupa dampak sosial, ekonomi, politik, keamanan dan yang lebih besar adalah bisa mengancam keutuhan negara.
6. Dalam era globalisasi sekarang ini, telah mempengaruhi rasa nasionalisme dan kebangsaan generasi muda. Seiring derasnya arus informasi dan masuknya budaya asing, telah merubah mental, sikap dan perilaku generasi muda dalam memahami wawasan kebangsaan. Generasi yang cinta akan bangsa dan



negaranya lambat laun semakin terkikis dan berubah dengan generasi muda yang bergaya hidup modern dan jauh dari norma-norma budaya bangsa.

7. Berkembangnya penyalahgunaan narkoba.

Mendasari isu-isu penting yang ada tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan kerja sama yang baik dengan berbagai unsur pemangku kepentingan baik anggota Forkompimda, TNI-POLRI, Imigrasi, BNN, Tim Kewaspadaan dini maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, guna mencapai sasaran dan target yang ada dalam program kegiatan yang telah ditetapkan, untuk mendukung misi menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan dan memberikan pembinaan dalam bentuk komunikasi, edukasi dan sosialisasi, guna mencapai sasaran dan target yang ada dalam program kegiatan yang telah ditetapkan, untuk mendukung misi membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung Tahun 2022 dituangkan dalam Rencana Strategis (RenStra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung periode 2021-2026 yang telah melalui perubahan melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (RenJa) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Dalam dokumen-dokumen tersebut di atas telah dijabarkan target kinerja selama periode 2021-2026 maka sesuai dengan dokumen tersebut Target Kinerja pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :



TARGET KINERJA PROGRAM

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DA POLITIK

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Jumlah Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bandar Lampung sampai dengan RKPD Kota Bandar ampung Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi	
			K	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
1.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebagsaan	3	100	%
1.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik			
	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	2	70	%
1.04	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
	Persentase Laporan Keberadaan ORMAS dan Pembinaan ORMAS	2	50	%
1.05	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
	Persentase Penangana Konflik Sosial Keagamaan da Ras	3	100	%
1.06	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			
	Persentase Konflik Sosial yang terselesaikan	4	80	%
	Persentase SDM yang mempunyai kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Diniterhadap Kerawanan Konflik Sosial		60	%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam rangka mewujudkan eksistensi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada sesuai dengan visi dan misi organisasi sehingga memberikan laporan yang tepat mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran serta program/kegiatan sebagaimana yang ditetapkan.

Program Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung pada dasarnya merupakan penjabaran sasaran dan kebijakan secara rinci tentang langkah-langkah yang diambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung. Program Tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut :



1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Rencana Strategis (RenStra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2016- 2021 sebagai berikut :

MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM		INDIKATOR	Target RPJMD					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.		MENGEMBANGKAN MASYARAKAT AGAMIS DAN BERBUDAYA						
5.1.1.	Meningkatnya Rasa Aman Di Masyarakat	Angka Kriminalitas	3.293	3.029	2.878	2.734	2.597	
1.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengamanan Trantibmas dan Pencegahan Kriminal	80%	80%	80%	80%	80%	
2.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Konflik Sosial yang terselesaikan	60%	75%	80%	80%	80%	
		Persentase SDM yang mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial		60%	60%	60%	60%	



	3.	Program Pembinaan dan Bantuan Terhadap Kehidupan Beragama	Persentase Organisasi Keagamaan yang Dibina	70%	70%				
	4.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Tingkat Partisipasi RT dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	70%	70%	70%	70%	70%	
	5.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Kota						
			Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Provinsi			70%			
			Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Legislatif				70%		
			Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Presiden				70%		

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, Indikator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	Target RPJMD						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5.	MENGEMBANGKAN MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN MENGEMBANGKAN BUDAYA DAERAH UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT YANG RELIGIUS							
5.1.	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara yang Aman, Tentram dan Damai Berlandaskan Nilai Nilai Budaya							
5.1.1.	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	Angka kriminalitas yang tertangani	1.411	1.531	1.625	1.679	1.724	1.724
		Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	78,00%	78,50%	79,00%	79,50%	80,00%	80,00%
02.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	70%	70%	70%	70%	70%	70%
	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	70%	70%	70%	70%	70%

MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM		INDIKATOR	Target RPJMD						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	04.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang dibina	50%	50%	50%	50%	50%	50%
	05.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Penanganan Konflik Keagamaan dan Ras	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	06.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang terselesaikan	80%	80%	80%	80%	80%	80%
			Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini, dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	60%	60%	60%	60%	60%	60%



Target Kinerja Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2022 adalah :

<p style="text-align: center;">Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</p>	<p style="text-align: center;">Target Capaian Kinerja</p>
<p>I. PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p>	
<p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan 1 Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p>	
<p>1 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p style="text-align: center;">1 Dokumen</p>
<p>2 Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p style="text-align: center;">100 Orang</p>
<p>3 Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p style="text-align: center;">200 Orang</p>
<p>II. PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</p>	
<p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan 1 Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik</p>	
<p>1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p style="text-align: center;">100 Orang</p>
<p>2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p style="text-align: center;">1 Laporan</p>

<p style="text-align: center;">Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</p>	<p style="text-align: center;">Target Capaian Kinerja</p>
<p>III. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANIASI KEMASYARAKATAN</p>	
<p style="text-align: center;">Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanthapan 1 Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p>	
<p>1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p>	<p style="text-align: center;">6 Orang</p>
<p>2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p>	<p style="text-align: center;">1 Laporan</p>
<p>IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</p>	
<p style="text-align: center;">Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanthapan 1 Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p>	
<p>1 Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	<p style="text-align: center;">50 Orang</p>
<p>2 Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	<p style="text-align: center;">100 Orang</p>
<p>3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	<p style="text-align: center;">1 Laporan</p>

<p style="text-align: center;">Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</p>	<p style="text-align: center;">Target Capaian Kinerja</p>
<p style="text-align: center;">PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL V. DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</p>	
<p style="text-align: center;">Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan 1 Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</p>	
<p>1 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<p style="text-align: center;">1 Dokumen</p>
<p>2 Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<p style="text-align: center;">300 Orang</p>
<p>3 Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<p style="text-align: center;">40 Orang</p>
<p>4 Pelaksanaan Monitoring, Evluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<p style="text-align: center;">1 Laporan</p>

Sementara Capaian Kinerja Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2022 adalah :

TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Urusan/ Bidang Urusan Pemerint ahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Jumlah Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bandar Lampung Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bandar Lampung yang dievaluasi (Tahun 2022)	
			K	Satuan	K	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
1.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	3	100	%	100	%
1.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik					
	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	2	70	%	70	%
1.04	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					
	Persentase Laporan Keberadaan ORMAS dan Pembinaan ORMAS	2	50	%	50	%
1.05	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					
	Persentase Penanganan Konflik Sosial Keagamaan dan Ras	3	100	%	100	%
1.06	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial					
	Persentase Konflik Sosial yang terselesaikan	4	80	%	80	%
	Persentase SDM yang mempunyai kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Diniterhadap Kerawanan Konflik Sosial		60	%	60	%



Adapun Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 24.999.976,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.985.780,- atau 99,94%.
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.392.631.078,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.094.980.650,- atau 87,56%.
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 88.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 83.300.000,- atau 94,12%.
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.042.000,- atau 41,68%.
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 35.790.562,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.656.227,- atau 99,62%.
 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 4.993.946,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.993.946,- atau 100%.
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 19.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.825.000,- atau 93,82%.



4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 7.498.163,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.498.163,- atau 100%.
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.000.000,- atau 100%.
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 28.783.016,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.852.231,- atau 86,34%.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 79.819.000,- atau 99,77%.
 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 77.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 77.632.300,- atau 99,91%.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.513.969,- atau 70,09%.
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 58.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 58.500.000,- atau 100%.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 33.532.088,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.531.218,- atau 99,99%.
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 6.200.259,- dan

- teralisasi sebesar Rp. 6.198.961,- atau 99,98%.
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 9.000.000,- atau 100%.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 49.999.896,- dan teralisasi sebesar Rp. 44.998.540,- atau 99,99%.
 2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan anggaran Rp. 112.800.079,- dan teralisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.
 3. Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 149.999.882,- dan teralisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.
 3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik
 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika



- Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 111.795.207,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.
2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.450.795.207,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.334.604.830,- atau 92,02%.
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
 1. Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan anggaran Rp. 770.599.957,- dan terealisasi sebesar Rp. 716.096.240,- atau 92,93%.
 2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan anggaran Rp. 146.699.905,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 1. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi,

- Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran Rp. 99.999.973,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.
2. Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 74.999.813,- dan terealisasi Rp. 0,- atau 0%.
 3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 396.499.829,- dan terealisasi sebesar Rp. 384.695.180,- atau 97,20%.
6. Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 63.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 53.417.971,- atau 84,12%
 2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan

anggaran sebesar Rp. 149.999.840,- dan terealisasi sebesar Rp. 117.658.240,- atau 78,44%.

3. Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 257.499.971,- dan terealisasi sebesar Rp. 210.878.680,- atau 91,89%.
4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 40.199.946,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.245.930,- atau 75,24%.

Pada Tahun 2022 sesuai dengan Rencana Starategis (RenStra) 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung adalah Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani sebesar 78,50% dan Angka Kriminalitas yang tertangani sebanyak 1.531 dengan capaian sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TAHUN 2022		KET
				TARGET	CAPAIAN	
1	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1.302	1.531	1.632	Sumber POLRESTA Bandar Lampung
2	Persentase Konflik Sosial, Keagamaan	Persen	78,00	78,50	100	Sumber Badan



NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TAHUN 2022		KET
				TARGET	CAPAIAN	
	dan RAS yang tertangani					KESBANGPOL Kota B. Lpg.

Dengan diuraikannya realisasi kinerja pada Tahun Anggaran 2021 di atas, maka realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung dapat digambarkan dengan tabel berikut :

TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA															
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
KOTA BANDAR LAMPUNG															
PERIODE PELAKSANAAN : 2021 - 2026															
SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	Data capaian pada awal tahun perencanaan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA						REALISASI CAPAIAN TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target
Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama guna Keamanan dan Ketertiban di Kota Bandar Lampung yang Berwawasan Kebangsaan dalam bingkai NKRI		Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama guna Keamanan dan Ketertiban di Kota Bandar Lampung yang Berwawasan Kebangsaan dalam bingkai NKRI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%			
	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terciptanya Forum Keberagaman Suku dalam Bingkai NKRI di Kota Bandar Lampung Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 1	1 Forum 1 Dokumen		1 Dokumen	1 Forum 1 Dokumen								
	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang					
	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Koordinasi Pemerintah dengan TNI dalam Revolusi Mental Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20 200	20 Kec 200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	20 Kec 200 Orang				
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%			
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100	100 Orang	100 Orang		100 Orang	100 Orang							
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100		100 Orang										
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Parpol yg Menerima Bantuan Sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11 1	11 Parpol 1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	11 Parpol 1 Laporan				



	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE ORMAS YANG DIBINA	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%						
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Laporan Keberadaan & Pembinaan ORMAS	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%						
	Penyusunan Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen						
	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	6		6 Orang								6 Orang				
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1	1 Laporan	0%												
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	PERSENTASE PENANGANAN KONFLIK KEAGAMAAN DAN RAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Konflik Keagamaan dan Ras yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50	50 Orang	0												
	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100	100 Orang	0												
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	1 Laporan													
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang terselesaikan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%						
		Persentase SDM yang mempunyai kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dinterhadap Kerawanan Konflik Sosial	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%						
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Konflik Sosial yang terselesaikan dan Kemampuan SDM dalam Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%						
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antara Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1	1 Dokumen													
	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antara Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pengamanan Cuti Bersama Hari Besar Nasional dan HUT Kota Bandar Lampung	3	3 Kali								3 Kali					
		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	300		300 Orang		300 Orang										



	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di DAerah	Terciptanya Kondisi Kepekaan, Kesiagaan dan Antisipasi Masyarakat Guna Deteksi Dini dan Cegah Dini Kerawanan Stabilitas Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	1 Tim							1 Tim						
			40		40 Orang			40 Orang									
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	1 Laporan													
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen								



B. Realisasi Anggaran

Realisasi penggunaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

No.	Organisasi Perangkat Daerah	ANGGARAN	REALISASI
1	Badan Kesatua Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung	6.765.530.523,00	5.473.925.076,00

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja lembaga dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung pada tahun 2022. Pengukuran indikator kinerja utama menunjukkan pencapaian sebesar 100,00 persen. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, LKPP mendapatkan alokasi dana untuk tahun anggaran 2022 sebesar **Rp. 6.765.530.523,-** terealisasi sebesar **Rp. 5.473.925.076,-** atau sebesar **80,91%**. Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 relatif berjalan dengan baik. Namun ada beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program kerja dan peningkatan kinerja antara lain :

- a. Kurang memadai anggaran pada Badan KESBANGPOL Kota Bandar Lampung untuk menunjang tugas dan fungsinya.
- b. Kurangnya Sarana dan Prasarana (Kendaraan Operasional dan Perangkat Kerja) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung menjadi permasalahan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- c. Minimnya SDM dan jumlah pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung menjadi kendala dalam pelaksanaan program kerja dan menjadi penghambat peningkatan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.



B. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung Tahun 2022 dilakukan langkah - langkah sebagai berikut :

- a. Penambahan Sarana dan Prasarana sebagai penunjang mobilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.
- b. Perlu adanya Pendidikan dan Pelatihan kepada fungsional/pelaksana agar memiliki keahlian khusus terkait Deteksi Dini, Cegah Dini.

Bandar Lampung, Januari 2023
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Drs. H. SERADEN, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19640507 199403 1 001

